

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, S., 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- International Monetary Fund*, 2015, *South Africa: Financial Sector Assessment Program-Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)-Technical Note, IMF Country Report No.15/51*, *International Monetary Fund Publication Services*, Washington.
- \_\_\_\_\_, 2021, *South Africa: Detailed Assessment Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism*, *International Monetary Fund Publication Services*, Washington.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021, *Komitmen Indonesia Pada United Convention against Corruption (UNCAC) dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2020*, Jakarta.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mohammad Fadil Imran, 2024, *Perbandingan Sistem Hukum*, Tahta Media Group, Jawa Tengah.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Pedro Gomes, Selvan Lehmann, Anja Roth, dan Kodjo Attisso, (2012), *South Africa Anti-Corruption Architecture*, Baset Institute on Governance, International Centre for Asset Recovery, Switzerland.
- Sudikno Mertokusumo, 2018, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2021, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Theodore, Linda, Wingate, dan Larissa, 2009, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, The World Bank, Washington.

### Jurnal

- Afga Samudera dan Kevin Hartono, “Perbandingan Sistem Hukum *Civil Law* dan *Common Law* dalam Penerapan Yurisprudensi”, *Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquium* (November, 2024).
- African Criminal Justice Reform, “The independence and structure of the prosecuting authority”, ACJR FACTSHEET*, (Februari 2019).
- Ahmad Zuhdi dan Ari Ade K., “Legitimasi Hukum Asing Sebagai Pertimbangan Putusan oleh Mahkamah Konstitusi: Perbandingan Antara Indonesia dan Afrika Selatan, *Yurispruden*, Volume 7 Nomor 2 (Juni, 2024).
- Darmadi Djufri, “Pelaksanaan Perampasan Barang (Aset) Terkait Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Pengacara Negara”, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7 No.2 (Juni 2021).
- Deon Erasmus dan Angus L. Hornigold, “*Court supervised institutional transformation in South Africa*”, *Potchefstroom Electronic Law Journal* Vol.18 No.7 (Maret 2015).
- Devi Eka dan Otto Yudianto, “Urgensi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara”, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.1, No.2 (November 2022).
- Dhandy Parindo, dkk, “Konstruksi Hukum *Justice Collaborator* Sebagai *Plea Bargaining* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dari Kasus Richard Eliezer”, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3 No 4 (Oktober 2024).
- Eddy O.S. Hiariej, “*United Nations Convention against Corruption* dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 1 (Februari 2019).
- Fajar Nurhardianto, “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia”, *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 11 No. 1 (Januari-Juni 2015).
- Desi Fitriyani dan Muthi’ah Maizaroh, “Posibilitas Penerapan *in Rem Asset Forfeiture* Sebagai Upaya *Asset Recovery* di Indonesia”, *aml/cft journal*, Vol. 01 No. 02 (Juni 2023).
- Zararah A. Syah, “Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024”, Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan *Indonesia Corruption Watch*, (Agustus 2025).
- Ica Karina, “Proses Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana”, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol.5, No.2 (Maret 2025).

- Johan Le Grange dan Odette Coetzee, “*The Proportionality Inquiry in Civil Asset Forfeiture Cases under POCA*”, *DIAZ REUS International Law Firm*, Vol.3, (Agustus 2023).
- Kurniawan I. dan Afrizal, “Gugatan Keperdataan Oleh JPN Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Karena Korupsi”, *Nagari Law Review*, Volume 5 Number 1 (November, 2021).
- La Ghondohi, “Strategi Pengembalian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Hasil Korupsi di Bidang Pertambangan”, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 4 No. 1 (April, 2023).
- Lidya Susanti dan Rizki Amalia, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Secara Perdata”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol.5 No.3 (Mei 2025).
- Lindasari, “*Asset Forfeiture As An Instrument In Fighting Corruption*”, *Corruptio*, Vol. 5, Issue 2, (Juli 2024).
- Llewelyn Gray Curlewis, ““*Pay back the money*” – a paper on criminal and civil asset forfeiture within South Africa and suggestions for reform”, *Journal of Financial Crime* (Juni 2023).
- M. Dzikirullah H.N., “Mendudukan *Common Law System* dan *Civil Law System* Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif di Indonesia”, *Jurnal RechtsVinding* (September 2020).
- M. Rakhmat, “Refleksi terhadap Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata”, *Mimbar*, Vol.31, No.1, (Juni 2015).
- M. Yusuf Mustari, M Akbar, dan M. Yusuf Hasmin, “Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam Pengambilan Aset dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.05, No.05 (Mei 2022).
- Najib, M. A., “Polemik Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia”, *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 3 No. 2 (November 2023).
- Nia Putriyana dan Shintiya D. Puspita, “Tanggung Jawab Hukum dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Arena Hukum*, Vol.7, No. 3, (Desember 2014).
- Rahman, M. I. dan Halili, H., “Strategi Jaksa Pengacara Negara Untuk Memulihkan Kerugian Negara Akibat Korupsi Melalui Instrumen Hukum Keperdataan”, *Viva Justicia: Journal of Private Law*, Volume 1 Nomor 1 (Agustus 2024).

Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia”, *Jurnal INTEGRITAS*: Volume 3, Nomor 1 (Maret 2017).

Sri Rahayu, “Hak Tertuduh dalam Peradilan Pidana Berdasarkan *Adversary System*”, *Jurnal Inovatif*, Vol. VIII No. 1 (Januari 2015).

Sulistiyono, A., dkk, “*The Role of The Prosecutor’s Office in Asset Seizure*”, *Ann Publisher, Journal of LegiSci*, Volume 1 No. 2 (Oktober 2023).

Tri Indah Sakinah dan Benny Sumardiana, “Konsep Kebijakan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Melalui Gugatan *In Rem* Berdasarkan Pendekatan *Economic Analysis of Law*”, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol.28(1), (April 2025).

Yohanes, Y., dkk, “Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya”, *UNES Law Review*, Vol.6 No.1 (November 2023).

Zainudin Hasan, Aisyah H. Azra, dkk, “Perampasan Aset sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Volume 3, Nomor 1, (Maret 2025).

### **Hasil Penelitian dan Tugas Akhir**

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana.

Haswandi, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia, 2017, Disertasi ujian terbuka Doktor Ilmu Hukum di Universitas Andalas.

Marumo Omotoye dan Lucia Cizmaziova, *Anti-Corruption, Stolen Asset Recovery and Civil Society in South Africa*, 2022, Civil Forum For Asset Recovery Research Paper.

Stephanie Naidoo, 2016, *The South African Criminal Law’s Response to The Crimes of Fraud and Corruption Within Local Government*.

Yunus Husein, Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

### **Makalah dan Pidato**

Alkostar, A, “Korupsi Sebagai *Extra Ordinary Crime*”, Makalah, Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Santika *Premiere* Jogja (November, 2013) *Jurnal Equitable*, Vol. 8, No. 2, 18-21 November 2023.

*Financial Intelligence Centre*, “*Laundering and Counter-Terrorism Financing Workshop: What happens with the intelligence that is gathered?*”, presentasi disampaikan pada monitoring dan analisis, (Februari 2019).

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Analisis Perbandingan Wewenang Litigasi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan di 10 Negara”, presentasi disampaikan dalam Diskusi Online Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, “RUU Perampasan Aset: *Game Changer* Pemberantasan Korupsi atau Gimik Politik?”, (Mei, 2025).

*United Nations Convention against Corruption*, “*Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption*”, CAC/COSP/2023/CRP.1, Sesi Kesepuluh Konferensi di Atlanta, Amerika Serikat, (11-15 Desember 2023).

## Artikel

Abdul F. Hadjar, “KUHP & Masa Depan Penegakan Hukum Pidana: Upaya Paksa Vs Perlindungan HAM”, *Hukumonline.com* (2025), <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-masa-depan-penegakan-hukum-pidana--upaya-paksa-vs-perlindungan-ham-1t67e4cdce5a545/>.

Adi Ahdiyati, “Hukuman Uang Pengganti Korupsi Tak Sebanding Kerugian Negara”, *databoks.katadata.co.id*, (2025), <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/67aec603af41a/hukuman-uang-pengganti-korupsi-tak-sebanding-kerugian-negara>.

Annalise Kempen, “*Taking The Profit Out of Crime – The Asset Forfeiture Unit*”, *npa.gov.za*, <https://www.npa.gov.za/sites/default/files/files/FAQs%20on%20AFU.pdf>.

Aslam Moosajee, “*Seizure of property obtained from unlawful or criminal activity*”, *ensafrica.com*, (2021), <https://www.ensafrica.com/news/detail/4825/seizure-of-property-obtained-from-unlawful-or>.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Keuangan Negara dan Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum”, *kepri.bpk.go.id*, (2019), <https://kepri.bpk.go.id/keuangan-negara-dan-kerugian-negara-dalam-perspektif-hukum/>.

- Colette Ashton, “SA must look beyond prosecution for anti-corruption remedies that work”, issafrica.org, 2024, <https://issafrica.org/iss-today/sa-must-look-beyond-prosecution-for-anti-corruption-remedies-that-work>.
- Corruption watch*, “Corruption and The Law in South Africa, A Quick Reference Guide”, corruptionwatch.org.za, (2015), <https://www.corruptionwatch.org.za/wp-content/uploads/2015/06/Corruption-Watch-Corruption-and-the-law-in-SA.pdf>.
- Dani Aswara, “Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset: Enak Aja Udah Korupsi Masih Pegang Aset”, Tempo.co, (2025), <https://www.tempo.co/politik/prabowo-dukung-ruu-perampasan-aset-enak-aja-udah-korupsi-masih-pegang-aset-1304728>.
- Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan *Indonesia Corruption Watch*, “Hasil Pemantauan Tren Vonis Tipikor Tahun 2022”, *Indonesia Corruption Watch*, (2023), [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/PPT\\_Tren%20Vonis%202022\\_0.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/PPT_Tren%20Vonis%202022_0.pdf).
- \_\_\_\_\_, “Pemantauan Persidangan Korupsi Tahun 2023”, *Indonesia Corruption Watch*, (2024), [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Paparan%20Tren%20Vonis%202023\\_0.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Paparan%20Tren%20Vonis%202023_0.pdf).
- H. Asmu’I Syarkowi, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata”, pa-sungguminasa.go.id, [https://www.pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel\\_Pengadilan/73-Perbuatan%20Melawan%20Hukum%20dalam%20Hukum%20Perdata.pdf](https://www.pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/73-Perbuatan%20Melawan%20Hukum%20dalam%20Hukum%20Perdata.pdf)
- Hawken McEwan, “Summary of SIU’s Report Into The R150 Million Digital Vibes Scandal”, kycafrica.ncino, <https://blog.kycafrica.ncino.com/digital-vibes>.
- Hukum Online, “Gugatan Perdata Terhadap Koruptor Terhalang Sistem Pembuktian”, hukumonline.com, (2005), <https://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-perdata-terhadap-koruptor-terhalang-sistem-pembuktian-hol12065/?page=all>.
- Indriani A. Syahrudin, “Teknik Beracara Perdata di Pengadilan”, djkn.kemenkeu.go.id, (2024), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-makassar/baca-artikel/16866/Teknik-Beracara-Perdata-di-Pengadilan.html>.
- Sarah S. Lubis, “Memahami Arti dari Kerugian Negara”, djkn.kemenkeu.go.id (2024), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-lhokseumawe/baca-artikel/17008/Memahami-Arti-Dari-Kerugian-Negara.html>.

- Nafiatul Munawaroh, “Cara Membuat Surat Gugatan Perdata”, hukumonline.com (2024), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-gugatan-perdata-cl2871/>.
- Paul Crosland dan Jered Shorkend, “*Asset Forfeiture and unlawful money schemes*”, Webber Wentzel, <https://www.webberwentzel.com/News/Pages/asset-forfeiture-and-unlawful-money-schemes.aspx>.
- Priya Biseswar, “*Asset Forfeiture Unit is hitting criminals where hurts most – nearly R6bn seized this year*”, Daily Maverick South Africa, (2022), <https://www.dailymaverick.co.za/article/2022-06-22-asset-forfeiture-unit-hits-criminals-where-it-hurts-most-their-pockets/>.
- Renata C. Auli, “Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”, hukumonline.com, (2025), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/>.
- Siti Safitri, “Apakah Skema Perampasan Aset Indonesia Sudah Siap? Telaahan Kritis Paradigma Unexplained Wealth Order Negara Lain”, antikorupsi.org, 2023, <https://antikorupsi.org/id/apakah-skema-perampasan-aset-indonesia-sudah-siap-telaahan-kritis-paradigma-unexplained-wealth>.
- South African Government, “*National legislature (Parliament)*”, gov.za, (2024), <https://www.gov.za/about-government/government-system/national-legislature-parliament>.
- \_\_\_\_\_, “*Special Investigating Unit on bank and investment account linked to Digital Vibes*”, gov.za, (2021), <https://www.gov.za/news/media-statements/special-investigating-unit-bank-and-investment-accounts-linked-digital-vibes>.
- \_\_\_\_\_, “*Special Investigating Unit on seized assets worth R52 million in alleged COVID-19-related corruption case*”, gov.za, (2024), <https://www.gov.za/news/media-statements/special-investigating-unit-seized-assets-worth-r52-million-alleged-covid-19>.
- Special Investigating Unit, “*About SIU*”, siu.org.za, <https://www.siu.org.za/about-us/>.
- \_\_\_\_\_, “*AFU and SIU granted order to freeze government land that was unlawfully transferred to private entities and individuals*”, siu.org.za, (2023), <https://www.siu.org.za/afu-and-siu-granted-order-to-freeze-government-land-that-was-unlawfully-transferred-to-private-entities-and-individuals/>.

*Stolen Asset Recovery Initiative, "Step by Step Guide for Asset Recovery"*, star.worldbank.org, (2013), [https://star.worldbank.org/sites/star/files/g20-asset\\_recovery\\_guide\\_2013\\_south\\_africa.pdf](https://star.worldbank.org/sites/star/files/g20-asset_recovery_guide_2013_south_africa.pdf).

Teuku Syarafi, "Konkritisasi Tujuan Pemidanaan Melalui Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi", pn-bandaaceh.go.id, (2024), <https://pn-bandaaceh.go.id/wp-content/uploads/Artikel-Dr-Teuku-Syarafi.pdf>.

*Transparency International, "Corruption Perceptions Index"*, Transparency.org, (2024), <https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/idn>.

\_\_\_\_\_, "*Corruption Perceptions Index*", Transparency.org, (2024), <https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/zaf>.

Willa Wahyuni, "Pembuktian Alat Bukti dalam Perkara Pidana dan Perdata", hukumonline.com, (2022), <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembuktian-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-dan-perdata-lt62d51f4edb81b/?page=2>.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Tinggi Afrika Selatan Nomor 46195/2021 perihal *Wildebeesfontein Properties and Project v NDPP, High Court of South Africa*, 6 Februari 2025.

### **Laporan Tahunan**

*Special Investigating Unit, "Special Investigating Unit Annual Report 2014/2015"*, 2015, hlm 14.

### **Peraturan**

*United Nations Convention against Corruption* (2003).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).

*The Constitution of the Republic of South Africa, 1996.*

*The Special Investigating Units and Special Tribunals Act No. 74 of 1996.*

*The Prevention of Organised Crime Act. 121 of 1998.*

*The Financial Intelligence Centre Act No. 38 of 2001.*

*The Prevention and Combating of Corrupt Activities Act 12 of 2004.*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298).

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### **Wawancara Pribadi**

Prof. Delano Cole van der Linde, LLB, LLM, LLD. Wawancara pribadi dengan penulis, 18 September 2025.

Zaenur Rohman. Wawancara pribadi dengan penulis, 29 September 2025.